

Nama : Muhammad Wildan Ghani

NPM : 2353031002

1. Analisis Struktur Pengeluaran

Struktur belanja pendidikan di Provinsi Nusantara Raya belum sepenuhnya efisien. Meskipun anggaran pendidikan sudah mencapai 22% dari APBD, sebagian besar dana, yaitu 68%, digunakan untuk gaji dan tunjangan guru. Belanja gaji memang penting, tetapi menjadi tidak efisien jika distribusi guru tidak merata. Dalam kasus ini, terdapat kelebihan guru di sekolah kota, sementara sekolah terpencil justru kekurangan guru. Artinya, masalahnya bukan hanya jumlah anggaran, tetapi juga tata kelola alokasi sumber daya.

Bagian yang perlu direalokasi adalah belanja administrasi dan sebagian belanja rutin yang kurang berdampak langsung pada hasil belajar. Anggaran administrasi sebesar 12% sebaiknya dikurangi secara bertahap dan dialihkan untuk peningkatan kualitas guru, pemerataan guru ke daerah terpencil, infrastruktur digital, serta program bantuan siswa berbasis kebutuhan. Belanja infrastruktur sebesar 12% juga perlu diperkuat, terutama untuk infrastruktur digital. Rendahnya literasi dan numerasi tidak hanya disebabkan oleh siswa, tetapi juga oleh keterbatasan fasilitas belajar, teknologi, dan kualitas pembelajaran. Jadi, struktur belanja perlu diarahkan dari sekadar membiayai operasional menjadi membiayai peningkatan mutu.

2. Analisis Sumber Pembiayaan

Pembiayaan pendidikan di Nusantara Raya masih terlalu bergantung pada pemerintah daerah. Ketergantungan ini berisiko karena kemampuan fiskal daerah terbatas, sementara kebutuhan pendidikan sangat besar. Oleh karena itu, perlu melibatkan sektor swasta, komunitas, dan skema pembiayaan alternatif. Model yang tepat bukan privatisasi pendidikan, tetapi kemitraan. Pemerintah tetap menjadi penanggung jawab utama, sedangkan swasta dan masyarakat menjadi pendukung. Contohnya adalah kerja sama CSR untuk penyediaan internet sekolah, laboratorium komputer, pelatihan digital guru, beasiswa siswa miskin, dan program sekolah binaan.

Selain itu, dapat dikembangkan skema public-private partnership untuk pembangunan infrastruktur digital sekolah. Dunia usaha juga dapat dilibatkan dalam pendidikan vokasi, magang, pelatihan keterampilan, dan penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan kerja. Namun, semua kerja sama harus diawasi agar tidak menimbulkan komersialisasi pendidikan atau ketimpangan baru antara sekolah yang menarik bagi swasta dan sekolah yang kurang diperhatikan.

3. Perbandingan dengan Negara OECD

Beberapa elemen praktik negara OECD yang realistis diadopsi oleh Nusantara Raya adalah performance-based budgeting, pendanaan berbasis kebutuhan siswa, peningkatan kualitas guru, dan evaluasi berbasis data. Performance-based budgeting dapat digunakan dengan cara mengaitkan anggaran dengan capaian pendidikan, misalnya peningkatan literasi, numerasi, kehadiran siswa, pemerataan guru, dan perbaikan fasilitas. Namun, pendekatan ini tidak boleh hanya menghukum sekolah yang hasilnya rendah. Sekolah di daerah terpencil justru perlu mendapat dukungan lebih besar karena menghadapi tantangan yang lebih berat.

Pendanaan berbasis kebutuhan siswa juga realistis diterapkan. Siswa miskin, siswa di daerah terpencil, siswa penyandang disabilitas, dan sekolah dengan fasilitas rendah

sebaiknya mendapat bobot pembiayaan lebih besar. Dengan begitu, anggaran tidak dibagi rata, tetapi dibagi sesuai kebutuhan. Tantangan implementasinya di Indonesia adalah kualitas data pendidikan yang belum merata, kapasitas birokrasi daerah yang berbeda-beda, resistensi dari pihak yang merasa dirugikan, serta budaya anggaran yang masih cenderung administratif. Selain itu, pemindahan guru dari kota ke daerah terpencil juga dapat menghadapi tantangan politik dan sosial.

4. Rancangan Reformasi Pembiayaan Pendidikan 5 Tahun

Tahun 1: Audit dan Penataan Data

Pada tahun pertama, pemerintah provinsi perlu melakukan audit belanja pendidikan, pemetaan jumlah guru, kondisi fasilitas sekolah, capaian literasi-numerasi, akses internet, dan kebutuhan siswa. Data ini menjadi dasar untuk menyusun kebijakan pembiayaan yang lebih adil dan tepat sasaran.

Tahun 2: Reorientasi Struktur Belanja

Pada tahun kedua, anggaran administrasi mulai dikurangi secara bertahap. Sebagian dana dialihkan untuk pelatihan guru, insentif guru daerah terpencil, perbaikan fasilitas dasar, dan bantuan siswa miskin. Struktur belanja mulai diarahkan pada program yang berdampak langsung terhadap hasil belajar.

Tahun 3: Peningkatan Kualitas Guru dan Pemerataan Distribusi

Pada tahun ketiga, pemerintah perlu menerapkan sistem redistribusi guru. Guru berlebih di kota dapat dialihkan atau diberi penugasan khusus ke daerah yang kekurangan guru. Agar kebijakan ini berjalan, perlu disediakan insentif daerah terpencil, tunjangan transportasi, fasilitas tempat tinggal, dan penghargaan karier. Pelatihan guru harus difokuskan pada literasi, numerasi, pembelajaran aktif, dan penggunaan teknologi.

Tahun 4: Digitalisasi Sekolah

Pada tahun keempat, pemerintah memperkuat digitalisasi sekolah, terutama di desa dan daerah terpencil. Program ini mencakup penyediaan internet, perangkat belajar digital, pelatihan guru, serta platform pembelajaran sederhana yang dapat digunakan sesuai kondisi daerah. Digitalisasi tidak boleh hanya berupa pembelian perangkat, tetapi harus disertai pendampingan agar benar-benar digunakan dalam proses belajar.

Tahun 5: Evaluasi Berbasis Kinerja dan Kebutuhan

Pada tahun kelima, pemerintah menerapkan sistem evaluasi berbasis data. Setiap sekolah dievaluasi berdasarkan perkembangan literasi, numerasi, kehadiran siswa, pemerataan guru, pemanfaatan teknologi, dan kondisi sosial ekonomi peserta didik. Hasil evaluasi digunakan untuk menentukan alokasi dana tahun berikutnya. Sekolah yang tertinggal tidak langsung dihukum, tetapi diberi pendampingan dan tambahan dukungan sesuai kebutuhan.

Kesimpulan

Reformasi pembiayaan pendidikan di Provinsi Nusantara Raya harus diarahkan dari belanja rutin menuju belanja yang berdampak pada mutu. Masalah utama bukan hanya besarnya anggaran, tetapi bagaimana anggaran digunakan. Belanja guru perlu dikaitkan dengan pemerataan dan kualitas pembelajaran. Belanja administrasi perlu dikurangi, sedangkan belanja untuk guru, bantuan siswa, dan digitalisasi perlu ditingkatkan.

Praktik OECD dapat menjadi inspirasi, terutama dalam hal anggaran berbasis kinerja, pendanaan berbasis kebutuhan, peningkatan kualitas guru, dan evaluasi berbasis data. Namun, penerapannya harus disesuaikan dengan kondisi Indonesia agar tetap adil, tidak teknokratis semata, dan tidak memperlebar ketimpangan antarsekolah.